

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pendidikan modern Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial dan politik saat itu, yang memunculkan berbagai organisasi keagamaan untuk memperjuangkan pembaruan di bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan.¹ Di tengah dominasi kolonial dan keterbatasan akses terhadap pengetahuan modern, umat Islam menghadapi tantangan besar. Kondisi ini mendorong gerakan modernisasi Islam sebagai respon terhadap tradisionalisme yang menekankan praktik ajaran klasik, dengan tetap mempertahankan nilai inti Islam sambil menyesuaikan pendidikan dan pemikiran dengan perkembangan zaman.

Salah satu komunitas yang cukup menonjol dalam merespons tantangan pendidikan dan sosial di Batavia adalah komunitas Arab. Secara umum, komunitas ini terdiri dari keturunan Arab yang berasal dari berbagai wilayah Jazirah Arab, termasuk Yaman, Hijaz, dan Hadhramaut. Namun, di antara kelompok-kelompok tersebut, komunitas Arab Hadhrami menempati posisi yang paling menonjol, tidak hanya karena peran sosial dan ekonominya yang signifikan, tetapi juga karena jaringan perdagangan yang luas dan populasi mereka yang lebih besar dibandingkan keturunan Arab lainnya. Dalam konteks itulah, muncul semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar selaras dengan tuntutan zaman. Semangat ini kemudian melahirkan Jamiat Kheir pada tahun 1905, organisasi yang sebagian besar dipelopori oleh anggota komunitas Arab Hadhrami. Jamiat Kheir memainkan peran penting dalam memperkenalkan model pendidikan Islam yang relatif modern, dengan metode pengajaran dan sistem administrasi yang lebih terstruktur, serta penggabungan pelajaran agama dan umum sebagai upaya menyiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan zaman.

Namun, dalam perjalanannya, Jamiat Kheir mengalami perbedaan pandangan di antara anggotanya. Perselisihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah administrasi, tetapi juga menyentuh isu-isu sosial yang sensitif, terutama

¹ Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. (Jakarta: LP3ES, 1996).

mengenai perbedaan status sosial antara kelompok sayyid (keturunan Nabi Muhammad SAW) dan non-sayyid di kalangan keturunan Arab. Persoalan kesetaraan sosial inilah yang memicu konflik internal, sehingga sebagian tokoh yang memiliki pandangan lebih egaliter dan rasional mendirikan organisasi baru bernama Al-Irsyad Al Islamiyyah pada tahun 1914, di bawah kepemimpinan Syaikh Ahmad Surkati.² Pendirian Al-Irsyad bukan sekadar peristiwa organisatoris, melainkan juga merupakan manifestasi dari gagasan reformisme Islam. Syaikh Ahmad Surkati dan para pengikutnya menolak konsep kemuliaan keturunan dan menekankan kesetaraan umat Islam di hadapan Allah. Ide ini kemudian diwujudkan melalui pendidikan yang menekankan rasionalitas, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern, dan semangat anti-feodalisme. Dalam pandangan Syaikh Ahmad Surkati, sekolah adalah sarana untuk membentuk generasi Muslim yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kemampuan adaptif terhadap modernitas.

Jakarta (Batavia) menjadi pusat awal gerakan Al-Irsyad sekaligus basis penting bagi penyebaran ide-ide pembaruannya. Sekolah-sekolah Al-Irsyad yang didirikan di kota ini menjadi model bagi cabang-cabang lain di berbagai daerah di Indonesia. Melalui lembaga pendidikan tersebut, Al-Irsyad berupaya melahirkan masyarakat Muslim yang maju, bebas dari fanatisme, serta mengedepankan rasionalitas dan persamaan sosial.

Meskipun kontribusi Al-Irsyad terhadap pembaruan pendidikan Islam cukup signifikan, kajian akademik yang secara khusus meneliti perkembangan lembaga pendidikan Al-Irsyad di Jakarta masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek teologis atau ideologis organisasi ini, sementara dimensi pendidikan dan peran sosialnya di perkotaan belum banyak dikaji secara mendalam.

Meneliti sejarah perkembangan Sekolah Al-Irsyad Jakarta memiliki signifikansi akademik yang tinggi karena lembaga ini merupakan bagian dari gerakan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Sebagai bagian dari organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Surkati Al-Anshori di Batavia pada tahun 1914, lembaga ini muncul dalam konteks

² Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Surkati: Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal. 118–123

kebangkitan Islam modern yang menekankan perlunya pembaharuan terhadap sistem pendidikan Islam tradisional yang dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman kolonial dan modern. Gerakan Al-Irsyad membawa semangat rasionalitas, anti-taklid, dan pembelajaran langsung dari sumber-sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pembaharuan Islam yang menekankan penggunaan akal dalam memahami agama sebagaimana diuraikan oleh Rahman (1982) dalam konsep *Islamic Reform and Renewal*. Dalam kerangka itu, menelusuri sejarah Sekolah Al-Irsyad Jakarta berarti menelaah proses lahirnya paradigma pendidikan Islam modern yang berpijak pada semangat rasionalitas, keilmuan, dan reformisme sosial.

Aspek menarik lain dari penelitian ini terletak pada dimensi intelektual dan peran tokoh sentral. Sosok Syaikh Ahmad Surkati menempati posisi penting dalam sejarah pemikiran Islam Indonesia, terutama karena pandangannya yang progresif mengenai kesetaraan sosial dan penolakannya terhadap fanatisme mazhab. Pemikiran Surkati memiliki kemiripan arah dengan gagasan reformis lain seperti Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan Ahmad Hassan (tokoh Persatuan Islam), yang sama-sama berupaya membangun pendidikan Islam berbasis rasionalitas dan kebebasan berpikir.³ Kajian terhadap peran tokoh-tokoh ini dalam pembentukan sistem pendidikan Al-Irsyad Jakarta akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai interkoneksi antara gerakan intelektual Islam reformis dan praksis pendidikan Islam modern di Indonesia.

Dari sudut pandang sosial dan pendidikan, Sekolah Al-Irsyad di Jakarta juga menarik untuk dikaji karena memiliki peran signifikan dalam pembentukan identitas masyarakat Arab-Indonesia dan Muslim modern perkotaan. Sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga transformasi sosial, Al-Irsyad turut menjadi agen pembentukan masyarakat Muslim yang mandiri dan berdaya saing tinggi.⁴ Sekolah ini berperan sebagai medium integrasi sosial di tengah masyarakat Jakarta yang multikultural, serta menjadi sarana mobilitas sosial dan penguatan nilai-nilai keislaman di

³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 114-120

⁴ Azyumardi Azra. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 210-215

kalangan generasi muda muslim urban. Meneliti kontribusi sosial-pendidikan Al-Irsyad dengan demikian berarti memahami fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan identitas dan kohesi sosial di tengah perubahan masyarakat modern.

Menariknya lagi, keberlanjutan Sekolah Al-Irsyad Jakarta hingga masa kini menunjukkan kemampuan adaptasi dan kontinuitas nilai reformisme Islam. Dalam perspektif sejarah pendidikan, keberlangsungan suatu lembaga di tengah perubahan politik, sosial, dan teknologi merupakan indikator keberhasilan institusi dalam menegosiasikan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas.⁵ Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana Al-Irsyad Jakarta mempertahankan prinsip-prinsip dasar pembaharuan Islam serta menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum nasional, globalisasi pendidikan, serta era digital. Kajian ini juga relevan dengan analisis Azra tentang pendidikan Islam dalam masyarakat modern, yang menekankan perlunya sistem pendidikan Islam mampu bersaing tanpa kehilangan akar nilai-nilai spiritualnya.

Selain bernilai teoretis, penelitian ini memiliki nilai historis dan dokumentatif yang tinggi. Minimnya dokumentasi ilmiah tentang sejarah lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia menjadikan penelitian terhadap Sekolah Al-Irsyad Jakarta sebagai kontribusi penting dalam historiografi pendidikan Islam. Melalui penelitian historis ini, muncul rekonstruksi yang lebih komprehensif tentang proses modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, sekaligus memberikan landasan bagi refleksi terhadap relevansi pemikiran reformis awal abad ke-20 dengan tantangan pendidikan kontemporer, seperti globalisasi, digitalisasi, dan multikulturalisme. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk merekam sejarah lembaga pendidikan, tetapi juga untuk menghadirkan pemahaman kritis tentang kesinambungan antara gagasan pembaharuan Islam masa lalu dan praktik pendidikan Islam masa kini di Indonesia.

Dalam konteks historiografi pendidikan Islam di Indonesia, penelitian ini menjadi penting karena dapat menyingkap dinamika internal umat Islam di tengah arus modernisasi dan kolonialisme. Al-Irsyad, dengan basis komunitas Arab dan visi pembaruannya, memberikan contoh bagaimana sebuah lembaga pendidikan

⁵ HAR Tilaar, H. A. R. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 25-30

dapat menjadi media transformasi sosial, ideologis, dan kultural. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana gagasan kesetaraan dan modernitas yang diperjuangkan oleh Ahmad Surkati diinternalisasikan melalui sistem pendidikan Al-Irsyad di Jakarta sejak masa kolonial hingga periode awal Orde Baru.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menulis sejarah kelembagaan Al-Irsyad, tetapi juga menelusuri proses sosial yang melingkupi lahir, berkembang, dan bertahannya lembaga pendidikan Islam modern di lingkungan masyarakat urban.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tesis berjudul “Perkembangan Lembaga Pendidikan Al-Irsyad di Jakarta (1914–1970): Sebuah Kajian Sosial Pendidikan Islam” diarahkan untuk menelaah dinamika sosial, kultural, dan keagamaan yang melatarbelakangi lahir, berkembang, serta bertransformasinya lembaga pendidikan Al-Irsyad dalam konteks perubahan sosial masyarakat Muslim urban di Jakarta. Penelitian ini tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek institusional atau kronologis pendirian dan perkembangan sekolah, tetapi juga pada makna sosial dan praksis budaya yang melingkupi proses tersebut.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini meliputi beberapa ranah tematik yang saling terkait. *Pertama*, mengenai konteks sosial dan ideologis lahirnya Al-Irsyad sebagai respons terhadap dominasi lembaga Jamiat Kheir dan situasi pendidikan kolonial Belanda awal abad ke-20. *Kedua*, mengenai konstruksi habitus Pendidikan Islam Reformis, yakni bagaimana nilai, pandangan, dan disposisi keagamaan modernis terinternalisasi dalam sistem pendidikan, kurikulum, dan praktik pembelajaran di lembaga Al-Irsyad. *Ketiga*, mengenai transformasi dan reproduksi sosial yang terjadi melalui interaksi antara struktur kolonial, perubahan politik pasca-kemerdekaan, dan dinamika sosial internal umat Islam di Jakarta, khususnya dalam mempertahankan dan menegosiasikan peran Al-Irsyad di tengah perkembangan pendidikan nasional.

Melalui fokus tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap perkembangan Al-Irsyad tidak dapat dipahami semata sebagai sejarah lembaga, melainkan sebagai produk dari praksis sosial yang kompleks, hasil dialektika antara struktur sosial dan

agen sejarah yang terus membentuk medan sosial pendidikan Islam modern di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi memahami sejarah pendidikan Islam sebagai medan pertarungan simbolik dan kultural, di mana nilai-nilai reformisme, modernitas, dan identitas keislaman berinteraksi dalam proses historis yang panjang.⁶

Adapun ruang lingkup spasial penelitian ini adalah Jakarta (Batavia) sebagai lokasi utama keberadaan dan aktivitas Lembaga Pendidikan Al-Irsyad dan juga wilayah lainnya tempat penyimpanan dokumen yang terkait dengan penelitian, contohnya di Bogor. Pada tahun 1914, wilayah Batavia secara administratif termasuk dalam *Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia* (*Afdeeling* Kota dan Pinggiran Batavia) dengan luas wilayah sekitar 182–250 kilometer persegi sebagaimana tercatat dalam arsip *Algemene Secretarie*. Sejak tahun 1905, Batavia telah berstatus *Gemeente* (Kotapraja) yang terbagi ke dalam beberapa distrik utama, antara lain *Benedenstad* (Kota Bawah) yang mencakup kawasan Kota Tua, *Molenvliet*, dan Tanjung Priok, serta *Weltevreden* sebagai wilayah kota baru yang lebih modern seperti Menteng dan Gondangdia. Selain itu, distrik lain yang termasuk dalam wilayah *Afdeeling Stad en Voorsteden* meliputi Penjaringan, Pasar Senen, Mangga Besar, dan Tanah Abang. Secara umum, Batavia merupakan kota kolonial yang sedang bertumbuh, relatif modern untuk ukuran zamannya, namun sarat dengan ketimpangan sosial dan dominasi politik kolonial Belanda.⁷

Pada awal abad ke-20, masyarakat keturunan Arab di Batavia hidup dalam struktur sosial yang sangat dipengaruhi kebijakan kolonial yang diskriminatif. Mereka diklasifikasikan sebagai *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing), yang menempatkan mereka di bawah rezim hukum dan administratif khusus, termasuk pembatasan mobilitas melalui sistem *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*. Meskipun demikian, komunitas Arab-Hadrami tetap berkembang sebagai kelompok pedagang, ulama, dan tokoh sosial yang berpengaruh, khususnya di kawasan Pekojaan dan sekitarnya. Dalam konteks inilah, pendirian dan perkembangan

⁶ Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

⁷ Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), *Besluit* 14 Agustus 1914, No. 22, tentang Perubahan Luas Wilayah *Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia* dan *Algemene Secretarie*. n.d. Tentang Luas Wilayah *Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia* (No. 4231).

lembaga pendidikan Al-Irsyad menjadi bagian dari upaya komunitas Arab mempertahankan identitas keislaman sekaligus merespons tantangan sosial-politik kolonial.

Perkembangan wilayah Batavia pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) lebih ditandai oleh perubahan administratif dan simbolik dibandingkan perluasan fisik kota. Pada tahun 1942, Jepang secara resmi mengubah nama Batavia menjadi Jakarta atau Djakarta, dengan nama administratif *Jakarta Tokubetsu Shi*, sebagai bagian dari kebijakan deNederlandisasi. Jakarta dijadikan pusat pemerintahan militer Jepang.

Pasca-kemerdekaan hingga tahun 1970, Jakarta mengalami pertumbuhan kota yang pesat menuju modernitas, tetapi juga dihadapkan pada berbagai persoalan urban yang kompleks. Pada tahun 1970, wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta secara administratif terbagi menjadi lima kotamadya, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Pembagian ini mencerminkan sistem pemerintahan otonomi khusus yang diperkuat pada masa Gubernur Ali Sadikin, ditandai dengan percepatan pembangunan fisik, penataan ruang kota, serta gelombang urbanisasi besar-besaran.

Dalam konteks mikro, kawasan Petojo yang terletak di antara Gambir, Tanah Abang, dan Sawah Besar, menjadi ruang penting dalam penelitian ini karena merupakan pusat aktivitas Lembaga Pendidikan Al-Irsyad. Sejak masa kolonial, Petojo dikenal sebagai kawasan permukiman multietnis yang dihuni oleh masyarakat pribumi, Tionghoa, dan keturunan Arab. Hingga tahun 1970, kawasan ini mengalami tekanan urbanisasi dan modernisasi kota, termasuk pembangunan infrastruktur, penataan kawasan, dan perubahan struktur sosialekonomi. Petojo pada periode ini tampil sebagai kawasan transisional yang mempertahankan jejak historis Batavia lama sekaligus terintegrasi dalam dinamika Jakarta modern.

Adapun batasan temporal penelitian ini ditetapkan pada rentang waktu 1914–1970. Tahun 1914 dipilih sebagai titik awal karena menandai berdirinya Jam'iyat al-Irsyad al-Islamiyyah oleh Syekh Ahmad Surkati, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam dan komunitas Arab-Hadrami di Batavia. Sementara itu, tahun 1970 ditetapkan sebagai batas akhir karena menandai berakhirnya fase transformasi internal Al-Irsyad dari lembaga berbasis komunitas

menuju lembaga pendidikan Islam modern yang berorientasi nasional. Selain itu, pada tahun tersebut diselenggarakan Mukhtar Al-Irsyad ke-30 di Bondowoso yang memutuskan penghentian keterlibatan Al-Irsyad dalam politik praktis. Dengan demikian, rentang waktu 1914–1970 merepresentasikan satu siklus sejarah yang utuh, mencakup fase pendirian, konsolidasi, dan transformasi lembaga.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa Lembaga Pendidikan Al-Irsyad berdiri sebagai Lembaga Pendidikan Islam bercorak modernis dikalangan keturunan Arab di Batavia?
2. Bagaimana perkembangan dan dinamika lembaga pendidikan Al-Irsyad di Jakarta dari masa kolonial hingga awal Orde Baru (1914–1970)?
3. Bagaimana peran lembaga pendidikan Al-Irsyad dalam proses modernisasi pendidikan Islam dan pembentukan identitas sosial-keagamaan umat Islam di Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dapat di rumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang Lembaga Pendidikan Al-Irsyad berdiri sebagai Lembaga Pendidikan Islam bercorak modernis dikalangan keturunan Arab di Batavia. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan dinamika lembaga pendidikan Al-Irsyad di Jakarta dari masa kolonial hingga awal Orde Baru (1914–1970) serta memaknai peran lembaga pendidikan Al-Irsyad dalam proses modernisasi pendidikan Islam dan pembentukan identitas sosial-keagamaan umat Islam di Jakarta.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka kegunaan hasil pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini dapat memperkaya khazanah historiografi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam aspek sejarah sosial pendidikan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan berharga bagi lembaga pendidikan yang ingin mempelajari model pengelolaan sekolah berbasis nilai keislaman dan modernitas untuk memperbaiki mutu manajemen, metode pengajaran, dan pembinaan karakter siswa.

